



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

**PENGUMUMAN REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) DAN
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI
KAJIAN INVESTASI BPKH PADA
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) DAN GRUP
Nomor: B. 08006/BPKH/BP/A7.4/03/2022**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian Investasi BPKH pada PT Permodalan Madani (PNM) dan Grup

Ruang Lingkup Pekerjaan

I. Melakukan penyusunan atas :

1. Analisa PT Permodalan Nasional Madani (Persero) :

1) Emiten :

- a. Profil Emiten.
- b. *Market Share* atau persaingan di industri jasa keuangan ultra mikro.
- c. Peringkat investasi yang diterbitkan dari lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2) Produk :

Program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan potensi perkembangannya di Indonesia.

3) Keuangan:

- a. Kinerja Keuangan selama tahun 2016-2021 PT Permodalan Nasional Madani.
- b. Mengukur tren pola risiko yang diukur melalui indikator *Non Performing Financing* ataupun *Portolio at Risk* atau *Value at Risk*.
- c. Melakukan analisis atas faktor-faktor penyebab kemungkinan terjadinya *Non Performing Financing*, serta strategi perusahaan baik dalam bentuk tindakan preventif ataupun represif untuk mencegah dan mengelola *Non Performing Financing*.
- d. Risiko konsentrasi kredit atas Investasi BPKH pada PNM grup terutama apabila terdapat penambahan investasi pada tahun-tahun berikutnya sampai dengan limit BMPI di BPKH

4) Peluang Investasi BPKH dalam bentuk Ekuitas/Saham kepada PT Permodalan Nasional Madani.

5) Analisis terkait :

a. *Kesesuaian indikator kualifikasi kinerja perusahaan (tingkat Kesehatan keuangan) sesuai dengan :*

- PKBP No. 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Investasi Surat Berharga Lainnya.
- POJK No. 16/POJK.05/2019 Tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

b. *Kesesuaian peluang investasi dalam bentuk ekuitas dengan regulasi internal BPKH.*

2. Rekomendasi atas :

- a. Peluang Investasi BPKH untuk modal kerja program UlaMM dan Mekaar Syariah PT Permodalan Nasional Madani (2022-2024) dalam bentuk Investasi Surat Berharga Lainnya.
- b. Potensi trend risiko selama tenor investasi (2022-2024).
- c. Peluang Investasi BPKH dalam bentuk Ekuitas/Saham.

II. Melakukan paparan atas hasil kajian kepada Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas.

III. Menyampaikan hasil kajian dalam bentuk PDF kepada Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas.

Kebutuhan
Ahli/Personil

Tenaga : Penyedia terpilih wajib menyediakan:

- A. Tenaga Ahli sebanyak 1 (satu), dengan kualifikasi sebagai berikut:
 1. Min. Pendidikan Magister/Strata II (S2);
 2. Memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidang pasar modal/keuangan/makro ekonomi/keuangan/perbankan syariah;
 3. Memiliki sertifikasi BSMR minimal level 3;
 4. Penyedia jasa memiliki pengalaman menulis buku/jurnal/publikasi ilmiah/riset/kajian kelayakan investasi/analisa investasi terkait dengan keuangan Syariah/surat berharga Syariah/analisa keuangan emiten di Indonesia serta dapat menyertakan bukti pendukung seperti sampul depan, *link* publikasi, dan lainnya minimal sebanyak 2 karya tulis.
- B. Asisten Tenaga Ahli sebanyak 1 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut :
 1. Min. Pendidikan Sarjana/Strata I (S1);
 2. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang pasar modal/keuangan/makro ekonomi/keuangan Syariah.

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

- Syarat Izin Usaha : Pengadaan ini bersifat terbuka untuk Pelaku Usaha berbentuk Badan Usaha yang memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 7020 (Aktivitas Konsultasi Manajemen).
- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 60 (enam puluh) hari kalender
- Keluaran (*Output*) : 1 (satu) set dokumen Kajian Investasi BPKH pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Group..
- Perkiraan Maksimal Biaya : Rp80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, **diwajibkan** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan **mengirimkan screen shot halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui *email* **divisi.pengadaan@bpkh.go.id** paling lambat pada hari **Jumat, 11 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Kajian Investasi BPKH pada PT Permodalan Madani (PNM) dan Grup*

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Selasa – Jumat, 8 – 11 Maret 2022	Selasa, 13.30 WIB	Jumat, 09.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>)	Selasa – Jumat, 8 – 11 Maret 2022	Selasa, 13.30 WIB	Jumat, 12.00 WIB

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Senin – Rabu, 14 – 16 Maret 2022	Senin, 09.00 WIB	Rabu, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis – Senin, 17 – 21 Maret 2022	Kamis, 08.00 WIB	Senin, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Selasa, 22 Maret 2022	08.00 WIB	17.00 WIB

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 Maret 2022

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 08006/BPKH/BP/A7.4/03/2022

Tanggal : 8 Maret 2022

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KOPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas - Chamber of Commerce Business Register						V	V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisili	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas - Chamber of Commerce Business Register						V	V
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP				V			
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) - Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	V
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) - Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	V

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAWYOPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN PERSONAL - WAJIB									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V		
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUIK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.